

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MK PELAKU
USAHA DALAM MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN TV
TABUNG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN**

Nama: Clarinsta Laksmi Bethari
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing: 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Standardisasi pada produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, karena dengan adanya standar dapat memberikan suatu petunjuk yang mengarah kepada suatu kesesuaian dalam penggunaan produk bahkan secara modern akan memberikan suatu kepastian kesesuaian dalam penggunaannya. Salah satu barang yang wajib SNI adalah TV Tabung. Dalam hal ini, TV Tabung yang sebelum diedarkan harus melalui proses uji sertifikasi dan dinyatakan telah lulus uji yang telah ditetapkan Pemerintah agar mendapatkan sertifikasi SNI, yang artinya produk tersebut telah memenuhi SNI. Apabila suatu produk tidak memiliki sertifikasi SNI, maka produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak dapat diedarkan kepada konsumen karena tidak menjamin keamanan, keselamatan maupun kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan TV Tabung tidak memiliki sertifikasi SNI, yang mana TV Tabung merupakan salah satu produk elektronik yang wajib memiliki sertifikasi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kata kunci: Standar Nasional Indonesia, Sertifikasi SNI, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MK PELAKU
USAHA DALAM MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN TV
TABUNG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN**

Name: Clarinsta Laksmi Bethari
Dicipline/Study Programme: Law/Law
Contributor: 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Standardization of products is very important in Indonesia, because the existence of a standard can provide a clue that leads to a suitability in the use of products even in a modern manner will provide a certainty of conformity in its use. One of the items that must be SNI is Tube TV. In this case, TV Tubes which before being circulated must go through a certification test process and are declared to have passed the test set by the Government to obtain SNI certification, which means that the product has met SNI. If a product does not have SNI certification, then the product does not meet the standards that have been issued and cannot be circulated to consumers because it does not guarantee safety, safety or health. In this regard, the researcher intended to analyze the criminal liability of business actors who trade and distribute TV Tubes not having SNI certification, which TV Tube is one of the electronic products that must have SNI certification in terms of Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment.

Keywords: Indonesian National Standard, SNI certification, Responsibility, Business Actors